

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM POLICY IN 2020 BAPPEDA OF LAMPUNG PROVINCE**

**BY**

**RISKA WIDI ASTUTI**

*Technological developments in the current era are very rapid and can be used as opportunities for the central government to retrieve fast, precise and accurate data in overcoming various problems, one of which is problems in regional development. The Local Government Information System (SIPD) is a data-based system, which can be expected to produce accurate planning data. -The research objective is to find out the implementation of the local government information system policy in the Bappeda of Lampung Province. The theory used is Edward III. This study uses a descriptive method using a qualitative approach. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. The results of the research are: First, on communication indicators, the application of the Local Government Information System has good communication between OPDs-so that the clarity of the purpose of this system is understood by individuals who are responsible for achieving goals. Second, indicators of resources, existing facilities are adequate, and the existing human resources are quite competent. Third, indicators of disposition or attitude. implementation of this system received a positive response. Bappeda Lampung Province has a commitment and responsibility to achieve a common goal. Fourth, the bureaucratic structure, data monitoring in the system is fully supervised directly by the central government under the Ministry of Home Affairs, so that the system cannot be accessed arbitrarily. These four indicators of resource communication, disposition and bureaucratic structure were successfully implemented by the Lampung Province Bappeda in implementing SIPD. The implementation of existing policies at Bappeda Lampung Province is in accordance with Law No. 23 of 2014*

**Keywords : Implementation, Local government, information system.**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**RISKA WIDI ASTUTI**

Perkembangan teknologi di era sekarang sangat pesat dan dapat dijadikan peluang untuk pemerintah pusat dalam mengambil data yang cepat, tepat dan akurat dalam mengatasi berbagai permasalahan, salah satunya permasalahan dalam hal pembangunan di daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem yang berbasis data, yang dapat diharapkan dapat menghasilkan data perencanaan yang akurat. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bappeda Provinsi Lampung. Teori yang digunakan yaitu Edward III. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian tersebut yaitu: *Pertama*, pada indikator komunikasi, penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah memiliki komunikasi yang baik antar OPD sehingga kejelasan tujuan sistem ini dipahami oleh individu yang bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. *Kedua*, indikator sumber daya, fasilitas yang ada telah memadai, dan SDM yang ada cukup berkopeten. *Ketiga*, indikator disposisi atau sikap, penerapan sistem ini mendapat tanggapan yang positif, Bappeda Provinsi Lampung memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk tercapainya sebuah tujuan bersama. *Keempat*, struktur birokrasi, pengawasan data dalam sistem sepenuhnya diawasi langsung oleh pemerintah pusat dibawah Kementerian Dalam Negeri, sehingga sistem tidak dapat diakses sembarangan. keempat indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi ini berhasil dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Lampung dalam menjalankan SIPD. Implementasi kebijakan yang ada di Bappeda Provinsi lampung telah sesuai dengan UU No 23 tahun 2014.

**Kata Kunci : Implementasi, Sistem Informasi, Pemerintah Daerah**